



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) 2025



DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

JL. IR. H. JUANDA NO. 100 BEKASI, JAWA BARAT

TELEPON 021-88349600, FAX. 021-88349600, EMAIL : DINSOSKOTABEKASI@GMAIL.COM



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2025, Dinas Sosial Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Bekasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- a. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- d. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, Januari 2026
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI



ROBER TP. SIAGIAN, S.STP., M.Si.
NIP. 19770126 199703 1 003

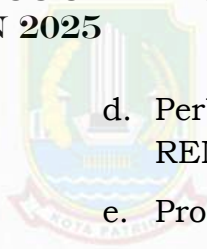


DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	7
1.5. Aspek Strategis dan isu Strategis Organisasi	11
1.6. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	13
1.7. Sistematika Penyusunan LKIP	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Perencanaan Kinerja Periode RPD.....	18
2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2024-2026	18
2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran	18
2.1.1.2 Indikator Kinerja Utama	19
2.1.2. Perjanjian Kinerja	19
2.2. Perencanaan Kinerja Periode RPJMD	22
2.2.1. Rencana Strategis 2025-2029	22
2.2.1.1 Tujuan dan Sasaran	23
2.2.1.2 Indikator Kinerja Utama	26
2.2.2. Perjanjian Kinerja	28



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKIP)
2025

d. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Target RENSTRA.....	62
e. Program Pendukung	63

3.3 Realisasi Anggaran	64
------------------------------	----

3.4 Dukungan Sumber Daya Manusia.....	66
---------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

JL. IR. H. JUANDA NO. 100 BEKASI, JAWA BARAT

TELEPON 021-88349600, FAX. 021-88349600, EMAIL : DINSOSKOTABEKASI@GMAIL.COM



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis-Jenis PPKS.....	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Bekasi.....	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Periode 2024-2026.....	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Murni Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025 (Eselon II).....	20
Tabel 2.4	Tujuan Renstra Tahun 2025-2029.....	25
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama 2025.....	27
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan 2025.....	28
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Triwulan III Tahun 2025.....	34
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025.....	36
Tabel 3.4	Komponen Penilaian AKIP.....	41
Tabel 3.5	Komponen Penilaian SKM.....	42
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.....	45
Tabel 3.7	Data Capaian persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial Tahun 2024 dan 2025.....	46
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.....	47
Tabel 3.9	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	50
Tabel 3.10	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Bekasi.....	51
Tabel 3.11	Realisasi PPKS yang diberikan Pelayanan Kesajahteraan Sosial.....	53



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025

Tabel 3.12	Jumlah Korban Bencana Tahun 2025.....	54
Tabel 3.13	Realisasi PPKS yang menerima Bantuan Langsung Tunai.....	56
Tabel 3.14	Jumlah Realisasi PPKS pada Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).....	56
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PSKS yang dibina.....	58
Tabel 3.16	Data Capaian persentase PSKS yang dibina Tahun 2024 dan 2025.....	59
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase PSKS yang dibina..	60
Tabel 3.18	Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase psks yang dibina.....	61
Tabel 3.19	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase psks yang dibina Target Akhir Renstra 2025-2029.....	62
Tabel 3.20	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase psks yang dibina di Dinas Sosial Kota Bekasi.....	63
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar nasional.....	64
Tabel 3.22	Pagu Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi Per Program Tahun 2025.....	65
Tabel 3.23	Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi Setelah APBD-P Per Program Tahun 2025...	65
Tabel 3.24	Kebutuhan Personil	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, terutamanya masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial). Upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial tersebut, dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Dinas Sosial senantiasa berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan, serta pencapaian target RPJMD 2025-2029. Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan menggantikan Renstra 2024-2026 yang merupakan penjabaran operasional Dinas Sosial untuk mendukung sasaran RPD 2024-2026.

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinergi yakni :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025

1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (enablers) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, aset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan.
2. Akuntabilitas proses, fokusnya adalah pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan- tindakan koreksi, apakah semua proses sudah sesuai dengan misi instansi.
3. Akuntabilitas program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (Customer) dan stakeholder serta memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025 adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025. LKIP ini disusun sebagai dokumen resmi yang menggambarkan capaian kinerja organisasi dalam mendukung fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus menjadi bahan evaluasi internal guna perbaikan kinerja berkelanjutan.

Tujuan penyusunan LKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat (Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Sosial, dan masyarakat) atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025–2029;
2. Menjadi dasar evaluasi dan pembelajaran organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian dukungan administratif dan teknis kepada Dinas Sosial.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025

3. Memperkuat sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja melalui analisis menyeluruh terhadap capaian, hambatan, faktor pendukung, serta rekomendasi perbaikan yang berbasis data dan fakta;
4. Mendorong budaya kerja berbasis kinerja yang responsif, profesional, dan berintegritas, sesuai dengan prinsip good governance dan komitmen terhadap Visi Kota Bekasi “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”;
5. Menjadi dokumen pendukung dalam proses reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan harapan memperoleh predikat “Sangat Baik” dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dokumen ini disusun tanpa mengandung data estimasi atau proyeksi, dan akan dilengkapi dengan realisasi kinerja dan anggaran akhir Tahun Anggaran 2025 setelah seluruh kegiatan selesai dievaluasi dan diverifikasi sesuai standar akuntansi pemerintahan dan manajemen kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.4 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah Kota Bekasi kemudian diperbaharui dengan Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada dinas sosial kota bekasi yang berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah dan yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Sosial memiliki kewenangan dan tugas tentang pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Pembinaan Sosial (PS) yang bertanggung jawab kepada Walikota Bekasi sebagai realisasi pelaksanaan upaya untuk



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025

mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dinas Sosial merupakan unit kerja pada Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kekuatan SDM yang terdiri dari pegawai struktural yang dimulai dari Eselon II / b yang merupakan pangkat jabatan Kepala Dinas, Eselon III / a yang merupakan pangkat jabatan Sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bidang , 1 (Satu) Kepala Sub. Bagian dan 12 (Dua Belas) Jabatan Fungsional.

Dinas Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial

Fungsi Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis penanganan bidang sosial di daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis organisasi di bidang sosial yang menjadi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS serta Pembinaan Sosial.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kota Bekasi bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Kebijakan pelayanan Pemerlu



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta Pembinaan Sosial (PS) dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Perencana Ahli Muda
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Peksos Ahli Muda Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Peksos Ahli Muda Substansi Perlindungan Sosial Korban Sosial
 - Peksos Ahli Muda Substansi Jaminan Sosial Keluarga
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Peksos Ahli Muda Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - Peksos Ahli Muda Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - Peksos Ahli Muda Substansi Rehabilitasi Disabilitas
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Peksos Ahli Muda Substansi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
 - Peksos Ahli Muda Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
 - Peksos Ahli Muda Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.



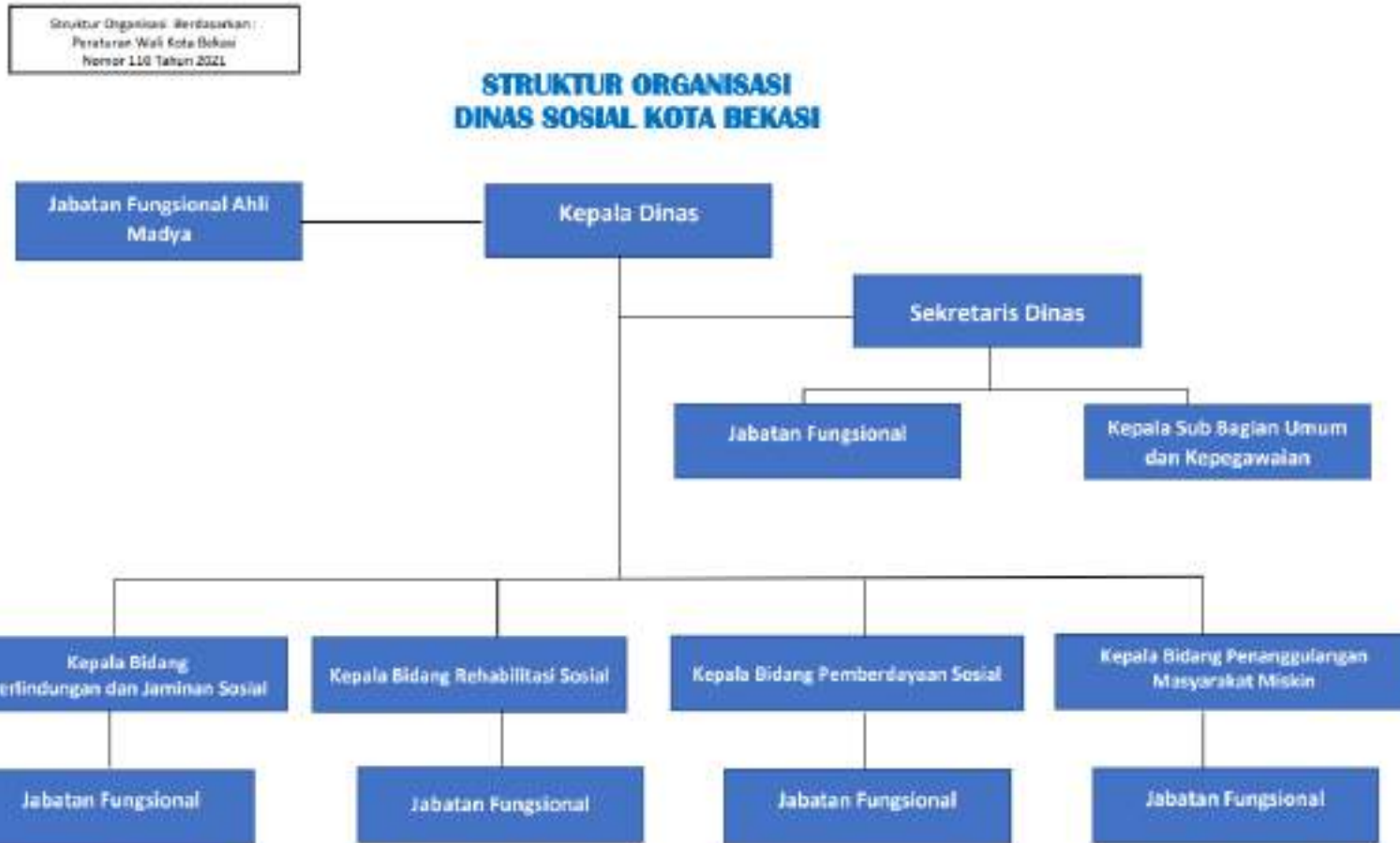
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025**



6. Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin
- Peksos Ahli Muda Substansi Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin
 - Peksos Ahli Muda Substansi Penanganan Masyarakat Miskin Perkotaan.
 - Peksos Ahli Muda Substansi Layanan, Rujukan dan Bantuan Stimulan Masyarakat Miskin.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Tahun 2025

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS

Dinas Sosial pada umumnya telah melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dalam mencapai tujuan RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029 dengan ***Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).***

Aspek Strategis yang menjadi fokus utama Dinas Sosial yaitu berperan dalam Penanganan Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pada Dinas Sosial Kota Bekasi ada 24 Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jenis-jenis PPKS

F1	Anak Balita Terlantar	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F2	Anak Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F3	Anak Berhadapan dengan Hukum	F16	Keluarga Fakir Miskin (KK)
F4	Anak Jalanan	F17	Korban Bencana Sosial / Pengungsi
F5	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	F18	Keluarga berumah tidak layak huni
F6	Korban tindak kekerasan	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F7	Lanjut Usia Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F8	Penyandang Cacat	F19	Korban Bencana Alam
F9	Tuna Susila	F20	Wanita Rawan Sosial Ekonomi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



F10	Pengemis	F21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
F11	Waria	F22	Orang dengan HIV /AIDS (ODHA)
F12	Gelandangan	F23	Keluarga Rentan
F13	Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan	F24	Traficking

1.5.1 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan aspek strategis diatas, menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi atau daerah. Isu ini bersifat fundamental, bisa terkait dengan pilihan kebijakan atau tantangan kritis yang perlu diatasi agar Dinas Sosial Kota Bekasi dapat mencapai tujuannya, **isu-isu strategis tersebut**, diantaranya :

- 1). Peningkatan Pelayanan dan Rehabiltasi PPKS.
- 2). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- 3). Optimalisasi Pendayagunaan data dan Informasi PPKS.

1.6 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2025 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Penunjang Urusan

1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 6 Kegiatan, diantaranya :	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber Data : Rancangan Akhir Renja 2025 Dinas Sosial dan Perubahan Renja Tahun 2025

II. Belanja Langsung Urusan

1	Program Pemberdayaan Sosial	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Rehabilitasi Sosial, terdiri dari 2 Kegiatan, diantaranya :	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025

		2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Penanganan Bencana	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sumber Data : Rancangan Akhir Renja 2025 Dinas Sosial dan Perubahan Renja Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis pelayanan di Dinas Sosial berperan dalam hal peningkatan Kesejahteraan Sosial .

Dinas Sosil berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.



1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang disusun selaras dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Asta Cita 2025-2029. Pada Renstra 2025-2029 dalam merumuskan tujuan dan sasaran berpedoman pada amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan ini menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan komitmen formal antara Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi dan Wali Kota Bekasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan kinerja ini bertujuan untuk:

1. Menjamin keselarasan antara kebijakan nasional, daerah, dan pelaksanaan tugas teknis Dinas Sosial;
2. Menjadi acuan objektif dalam pengukuran, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja;
3. Memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi.

2.1. Perencanaan Kinerja Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang termuat di dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024- 2026 menjadi landasan dalam penyusunan dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2024-2029, kerja tahunan dan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025.

2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Bekasi

Rencana Strategis dapat dicapai dengan cara merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adapun tujuan strategis Dinas Sosial pada periode tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Bekasi
2024-2026

SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	83,33	84,20	85,15	86,10	86,1
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	67,07	72,05	73,12	74,10	74,1
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	11 Angka Kemiskinan	%	0,22	04.05	04.04	04.03	4,3

Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	19	Indeks Risiko Bencana	Nilai	122	108	103	98	98
--	----	-----------------------	-------	-----	-----	-----	----	----

Sumber Data : Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026

2.1.1.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bekasi

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran strategis, ditentukan indikator sasaran dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kota Bekasi 2024-2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
			2024	2025	2026
-1	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB	BB
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5	80,5	80,5
2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	5%	6%	7%
3	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase psks yang dibina	100%	100%	100%

Sumber Data : Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026

2.1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada pada dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025



Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB Nilai
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50 Nilai
2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	6%
3.	Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase psks yang dibina	100%

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Murni 2025

Program	Anggaran	Ket (Sumber Dana)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.15.061.828.880	APBD
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 4.524.850.000	APBD
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.402.800.000	APBD
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 4.777.649.800	APBD
5. Program Penanganan Bencana	Rp. 2.130.000.000	APBD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 989.150.000	APBD
Total	Rp.31.886.278.680	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Murni 2025



2.2. Perencanaan Kinerja Periode RPJMD

2.2.1 Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 yang merupakan arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Perubahan yang sangat cepat dalam kerangka regulasi pada lima tahun belakangan ini menuntut Pemerintah Daerah untuk senantiasa tanggap dalam menyesuaikan proses pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMD dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2025 Kota Bekasi diperkirakan masih dihadapkan berbagai permasalahan strategis, diantaranya permasalahan Kesejahteraan Sosial, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025-2029 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi.

Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPJMD 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang menunjang urusan dan pelayanan pemerintahan, maka Dinas Sosial juga mengemban tugas untuk mendukung pelaksanaan misi-misi pembangunan daerah Kota Bekasi lainnya. Selain itu permasalahan-permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Dinas Sosial juga menjadi pertimbangan dalam



menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah harus melaksanakan amanat pada RPJMD dengan perumusan tujuan, dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dengan penjabaran sebagai berikut :

2.2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Dinas Sosial Kota Bekasi

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu :

“Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat”

Pada tujuan ini, kemiskinan merupakan isu nasional, yang menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kab/Kota. Segala upaya dalam mendukung pengentasan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dengan meningkatkan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) termasuk didalamnya masyarakat miskin, dalam upaya pencapaian tersebut, tidak luput peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025**



Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bekasi
Tahun 2025-2029

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat		Persentase Masyarakat Miskin	4,01	3,98	3,90	3,85	3,80	
				Persentase PPKS yang terlayani	12%	7%	8%	9%	10%	
				Persentase psks yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	12%	7%	8%	9%	10%	
			Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber Data : Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



2.2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Fokus indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi adalah mendukung tercapainya indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Indikator kinerja kepala Dinas Sosial Kota Bekasi akan dicapai oleh indikator kinerja eselon II dan indikator kinerja eselon III akan dicapai oleh indikator kinerja Jabatan Fungsional sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja Wali kota dan indikator kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial ini dirancang untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025**



**Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	Berdasarkan :	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan rehabsos}}{\text{Jumlah Sasaran PPKS di Kota Bekasi}} \times 100$	12%	
				1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			
2	Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang dibina	Persen (%)	4 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang dibina}}{\text{Jumlah PSKS di Kota Bekasi}} \times 100$	100%	
				5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			
				6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah			

2.2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mendukung RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bekasi yang mengacu pada Renstra Dinas Sosial serta disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Kesejahteraan Sosial dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan .

Indikator Kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025 dilakukan perubahan dari Sasaran Strategis sebelumnya, Dari Sasaran Strategis tersebut , diturunkan kedalam perjanjian kinerja, ada pun perjanjian kinerja seperti diuraikan ditabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025
(Eselon II)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	12%
2.	Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang dibina	100%

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Dinas Sosial Kota



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025**



Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.14.171.420.836	APBD
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.341.258.639	APBD
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.645.554.625	APBD
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 4.572.316.800	APBD
5. Program Penanganan Bencana	Rp. 1.876.244.335	APBD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 619.756.910	APBD
Total	Rp.29.226.552.145	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Perubahan Esselon II Dinas Sosial Kota



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2025.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian Tujuan dan Sasaran .

Tujuan Dinas Sosial Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan Peningkatan di Bidang sosial yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai Perangkat kerja Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial maka ditetapkan tujuan yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**”Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan
Ketahanan Sosial Masyarakat”**



Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu 3 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Sosial Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen RENSTRA Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Dinas Sosial Kota Bekasi melaksanakan Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Sosial, dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui target sasaran Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

3.1.1 Periode RPD

Pengukuran kinerja pada periode RPD dilakukan sampai dengan triwulan III, karena pada triwulan IV pengukuran kinerja sudah berdasarkan Renstra dan RPJMD 2025-2029. Untuk mengetahui pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Kriteria pencapaian indikator kinerja menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik. Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial
Triwulan III Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA TW III 2025 (%)
-1	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	BB	100
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5	92,86	115
2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	6%	-	-
3	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase psks yang dibina	100%	100%	100

Sumber Data : Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



Berdasarkan Tabel diatas, hampir semua indikator tercapai untuk target di Triwulan III, bahkan ada yang melebihi 100%, yaitu pada indikator Nilai SKM, sebesar 115%, dan ada Indikator yang belum ada realisasinya, hal ini pada triwulan III tidak ditetapkan target dan akan diakumulasikan di Triwulan IV.

3.1.2 Periode RPJMD

Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Sosial Kota Bekasi selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025-2029 serta perjanjian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-1	-2	-3	-4	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	%	12%	15,82%	132%
2	Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang dibina	%	100%	100%	100%

Sumber Data : *Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Tahun 2025*

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa secara keseluruhan sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja Tahun Anggaran 2025 dapat tercapai sesuai dengan target, adapun pencapaian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis **Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, pada sasaran ini, PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmanai, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025

PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja, sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial**, dengan Target di Tahun Anggaran 2025 sebesar 12% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 4 Program dan 4 Kegiatan. Target dari sasaran ini sebesar 12% dari Jumlah PPKS di Kota Bekasi, Yaitu 125.326 PPKS , sehingga Target Kinerja sebesar 12% atau sebesar 15.039 PPKS, Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 15,82% atau sebanyak 19.825 orang, sehingga Capaian Kinerja 132%. Pencapaian Sasaran ini didukung Program dan Kegiatan Sebagai berikut :

a. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

b. Program Penanganan Bencana

Kegiatan

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kegiatan

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota

d. Program Pemberdayaan Sosial

Gambar 1
Infografis
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)



PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025



FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PENGHASILAN

- 1** Penanganan Kesejahteraan Sosial berbasis Data dan kompetensi
- 2** Kolaborasi dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- 3** Dukungan Program Pemerintah Pusat

TREN PERKEMBANGAN NILAI



PROGRAM TERKAIT

1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

INTERVENSI UPAYA PENINGKATAN

1. Penyelenggaraan Peningkatan PSKS
2. Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial
3. Optimalisasi Koordinasi dengan Instansi vertikal



2. Sasaran Strategis **Meningkatnya keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, pada sasaran ini, keberfungsian PSKS dimana unsur PSKS yang dibina Dinas Sosial Kota Bekasi dapat melaksanakan Tugas dan fungsinya secara maksimal, yang mana tugas dan fungsinya adalah membantu Dinas Sosial dalam penanganan atau pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS, dalam penanganan atau pelayanan dimaksud, PSKS memberikan bantuan pendampingan bagi PPKS untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial baik dibidang Kesehatan, Pendidikan, maupun pendampingan dalam pelaksanaan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam hal ini ada 2 PSKS binaan Dinas Sosial Kota Bekasi, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang terdiri dari 238 PSM dan 12 TKSK, untuk meningkatkan keberfungsian PSKS, Dinas Sosial melakukan Pembinaan guna meningkatkan Kapasitas PSKS dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang dibina**, dengan target di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100% dari Jumlah PSKS di Dinas Sosial, Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan. Capaian Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan berfungsinya PSKS Dinas Sosial Kota Bekasi dengan jumlah 250 orang yang terdiri dari 12 orang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan 238 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pencapaian ini didukung oleh **Program Pemberdayaan Sosial** dengan **Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**.

Gambar 2
Infografis
Meningkatnya keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)



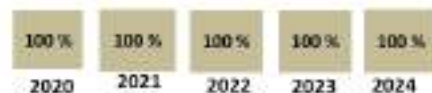
PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025



**FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG
PENGHASILAN**

- 1** Penanganan Kesejahteraan Sosial berbasis Data dan kompetensi
- 2** Kolaborasi dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- 3** Dukungan Program Pemerintah Pusat

TREN PERKEMBANGAN NILAI



PROGRAM TERKAIT

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

INTERVENSI UPAYA PENINGKATAN

1. Penyelenggaraan Peningkatan PSKS
2. Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial
3. Optimalisasi Koordinasi dengan Instansi vertikal



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.2.1 Periode RPD

3.2.1.1. Sasaran I (Pertama) : Meningkatnya nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Indikator I (Pertama) : Nilai AKIP

Nilai AKIP berdasarkan LHE AKIP Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 700.1.2.1/169-LHE/ITKO.Set Tanggal 30 September 2025 dengan Nilai 77,32 atau dengan Predikat BB, dengan komponen yang dinilai sebagai berikut :

Tabel 3.4
Komponen Penilaian AKIP

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2025	
		BOBOT	NILAI
1	Perencanaan kinerja	30	22,11
2	Pengukuran Kinerja	30	23,39
3	Pelaporan Kinerja	15	11,81
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,01
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,32

Sumber Data : LHE AKIP Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 700.1.2.1/169-LHE/ITKO.Set Tanggal 30 September 2025

2. Indikator II (Kedua) : Nilai IKM

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Laporan SKM Dinas Sosial Triwulan III Tanggal 31 Oktober 2025 dimana data SKM Triwulan III didapat pada <https://sisukma.bekasikota.go.id/> dan realisasi sebesar 92,86 dengan target 80,50, sehingga capaian Triwulan III sebesar 115%, adapun rincian Nilai IKM sebagai berikut :

Tabel 3..5
Komponen Penilaian SKM

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon- den	Persyaran	Prose- dur	Wak- tu	Bia- ya	Prod- uk	Kompet- ensi	Peril- aku	Sarp- ras	Pengad- uan	IKM Per Jenis Laya- nan
1	Pemberian Bantuan Pemakanan Tanggap darurat Bencana	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Pemakaman Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terlantar Luar Panti	33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Penerbitan Print Out Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS)	2078	93.35	93.45	93.18	92.4	91.4	92.48	94.58	90.6	94.7	92.9
4	Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Berobat rumah sakit (LKM)	57	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Yayasan Melalui Aplikasi Sketer	8	96.88	90.63	87.5	87.5	93.75	93.75	90.63	87.5	93.75	91.32
6	Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Rehabilitas di Yayasan /Balai/Panti	68	91.93	89.7	88.23	90.08	88.23	88.98	88.98	88.6	91.55	89.58
7	Penerbitan Surat Rekomendasi perwalian/Pengantar Adopsi Anak Terlantar	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Penerbitan Surat Rekomendasi Yayasan /Organisasi Sosial Penerima Bantuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemberian Standar Pelayanan Minimal Dasar di Rumah Singgah Dinas Sosial	53	86.8	86.33	83.98	87.28	85.38	84.9	90.1	66.05	87.28	84.22



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025

10	Penerbitan Rekomendasi Pemberian Bimbingan Fisik/Mental/Spiritual/Sosial bagi Disabilitas Terlantar/Anak Terlantar/Lanjut usia Terlantar /Gelandangan Pengemis/Tuna Sosial	40	86.88	88.75	85.63	80	84.38	80	85	68.13	88.13	82.99
11	Bantuan Sosial Anak Telantar/Disabilitas Terlantar/Lanjut Usia Terlantar/Gelandangan Pengemis/Tuna Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Sosial bagi Orang terlantar di Kota Bekasi	24	94.8	94.8	91.68	95.83	95.83	93.75	93.75	91.68	93.75	93.98
13	Pelayanan Tim Reaksi Cepat	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Pelayanan Pendirian Dapur Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rerata IKM Per Unsur			93.48	93.48	93.05	92.45	91.6	92.43	94.45	90.15	94.63	92.86
IKM Unit Layanan			92.86									
Mutu Unit Layanan			A									

Sumber Data : <https://sisukma.bekasikota.go.id/>

3.2.1.2 Sasaran II (Kedua) : Persentase PPKS Binaan yang Mandiri

1. Indikator Persentase PPKS Binaan yang Mandiri pada triwulan III tidak ditarget, dan akan di akumulasikan pada Triwulan IV, sehingga tidak ada capaian pada Triwulan III

3.2.1.3 Sasaran III (Ketiga) : Persentase PSKS yang berfungsi

1. Indikator Persentase PSKS yang berfungsi

Persentase psks yang dibina tiap Triwulan ditargetkan sebesar 100%, hal ini dikaitkan dengan Kinerja PSKS Binaan Dinas Sosial Kota Bekasi, seperti PSM dan TKSK, dan Capaian pada Triwulan III sebesar 100% sesuai dengan Laporan Kinerja PSKS.

3.2.2 Periode RPJMD

3.2.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

1. Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial a. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan realisasi Indikator Kinerja Utama

Pada sasaran ini, pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya (Jasmanai, Rohani dan Sosial) dapat terpenuhi secara memadai dan wajar, untuk memenuhi hal itu, Dinas Sosial mencoba membentuk PPKS yang mandiri dengan memberikan pembinaan dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar dari PPKS, dimana kemandirian PPKS dilihat dari keberhasilan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasar atau melakukan interaksi sosial baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan kerja, dengan Target di Tahun Anggaran 2025 sebesar 12% dari Total PPKS, Indikator ini didukung oleh 4 Program dan 4 Kegiatan.

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	persen	12	15,82	132

Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 12%, dan realisasi mencapai 15,82% persen, Target dari sasaran ini sebesar 12% dari Jumlah PPKS di Kota Bekasi, Yaitu 125.326 PPKS , sehingga Target Kinerja sebesar 12% atau sebesar 15.039 PPKS, Realisasi Kinerja pada Sasaran ini sebesar 15,82% atau sebanyak 19.825 orang, sehingga Capaian Kinerja 132%.

Sesuai dengan formulasi pada IKU Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025, maka perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah Sasaran PPKS di Kota Bekasi}} \times 100$$
$$\frac{19.825}{15.039} \times 100\%$$
$$= \mathbf{132\%}$$

dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 telah tercapai. Untuk melihat perbandingan capaian IKK Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun
2024 dengan 2025**

Tabel 3.7

Data Capaian persentase psks yang mendapatkan pelayanan
kesejahteraan sosial Tahun 2024 dan 2025

No	IKK	Capaian 2024	Capaian 2025	Ket
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	240%	132%	Turun
<i>Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025</i>				

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian yang menurun pada tahun 2025, hal ini disebabkan pada tahun 2025 ada kenaikan target dari 6% menjadi 12 %, kenaikan target ini disebabkan terjadinya bencana alam yang besar, Yaitu bencana Banjir, sedangkan pada Tahun 2024 target sebesar 5%, namun demikian kinerja dan layanan publik di Dinas Sosial dapat dikatakan tercapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang meningkat di Dinas Sosial antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 Untuk untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2024	2025
1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	12	15,82

Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025

c. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Target RENSTRA

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di tahun 2025. Capaian indikator Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial tahun 2025 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial Target Akhir Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	Persen	5	12	7	8	9	10
Realisasi	Persen	12	15,82				

Sumber Data : Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi



Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2024 sebesar 12% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2024 sebesar 5%, Kenaikan Jumlah Target di tahun 2025 disesuaikan atau diselaraskan dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029

d. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga penanganan Kesejahteraan Sosial ataupun pemberian Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Instansi terkait;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis Kesejahteraan Sosial masyarakat Kota Bekasi;
5. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



6. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan;
7. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
8. Telah dilaksanakannya setiap minggu rapat koordinasi internal untuk struktural Dinas Sosial untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil dan pengarahan dari Kepala Dinas kepada seluruh aparatur Dinas Sosial terkait pelaksanaan kegiatan maupun kinerja pegawai;
9. Seluruh Pegawai telah menandatangani pakta integritas, kontrak kinerja, Perjanjian Kinerja dan Surat Pernyataan Kesanggupan pada Dinas Sosial Kota Bekasi;
10. Telah diterapkannya kode etik pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi;
11. Telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Dinas Sosial Kota Bekasi.
12. Penyesuaian Jumlah Target mengacu kepada Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Pencapaian indikator Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2025 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.9
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan
kesejahteraan sosial

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Persen	100	100	100
4	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persen	100	100	100
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase PPKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

e. Program Pendukung

Ketercapaian Kinerja diperoleh melalui pelaksanaan 3 Program, yaitu, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama
Persentase PPKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial
di Dinas Sosial Kota Bekasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN			
			RENCANA		REALISASI	
			Rp	(%)	Rp	(%)
1.06.01.01 - 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.645.554.625	4.645.554.625	100	4.005.923.311	86,23
1.06.01.01 - 04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.645.554.625	4.645.554.625	100	4.005.923.311	86,23
1.06.01.01 - 04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	743.400.000	743.400.000	100	607.430.000	81,71
1.06.01.01 - 04.2.01.02	Penyediaan Sandang	100.000.000	100.000.000	100	98.534.022	98,53
1.06.01.01 - 04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	629.840.000	629.840.000	100	538.668.800	85,52
1.06.01.01 - 04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	589.000.000	589.000.000	100	406.917.797	69,09
1.06.01.01 - 04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	358.380.000	358.380.000	100	266.649.866	74,4
1.06.01.01 - 04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.380.000.000	1.380.000.000	100	1.306.664.516	94,69
1.06.01.01 - 04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	32.633.625	32.633.625	100	25.965.000	79,57
1.06.01.01 - 04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.000.000	50.000.000	100	49.476.719	98,95
1.06.01.01 - 04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	51.081.000	51.081.000	100	50.131.000	98,14
1.06.01.01 - 04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	199.190.000	199.190.000	100	170.800.000	85,75
1.06.01.01 - 04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12.030.000	12.030.000	100	10.884.000	90,47
1.06.01.01 - 04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	500.000.000	500.000.000	100	473.801.591	94,76
1.06.01.01 - 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.572.316.800	4.572.316.800	100	3.717.696.432	81,31
1.06.01.01 - 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.572.316.800	4.572.316.800	100	3.717.696.432	81,31
1.06.01.01 - 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.248.486.800	3.248.486.800	100	2.727.545.020	83,96
1.06.01.01 - 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.876.244.335	1.876.244.335	100	1.578.973.331	84,16
1.06.01.01 - 06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.381.879.910	1.381.879.910	100	1.160.398.691	83,97



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025

1.06.01.01 - 06.2.01.01	Penyediaan Makanan	588.240.000	588.240.000	100	491.669.672	83,58
1.06.01.01 - 06.2.01.02	Penyediaan Sandang	250.000.000	250.000.000	100	202.960.170	81,18
1.06.01.01 - 06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	241.253.910	241.253.910	100	191.139.598	79,23
1.06.01.01 - 06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	150.000.000	150.000.000	100	127.939.051	85,29
1.06.01.01 - 06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	494.364.425	494.364.425	100	418.574.640	84,67
1.06.01.01 - 06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	356.572.000	356.572.000	100	296.104.635	83,04
1.06.01.01 - 06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	137.792.425	137.792.425	100	122.470.005	88,88
JUMLAH		11.094.115.760	11.094.115.760	100	9.302.593.074	83,85

Sumber Data : Bag. Keuangan Dinas Sosial Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PPKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial, Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi pada Tahun 2025 sebesar Rp. 29.226.552.145 (Dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 25.081.142.712 (Dua puluh lima miliar delapan puluh satu juta seratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua belas rupiah) atau 85,82%, sedangkan Anggaran untuk penanganan PPKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial sebesar Rp. **11.094.115.760** (sebelas miliar sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

1. Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Kegiatan ini memiliki Indikator Jumlah PPKS Terlantar yang terdiri dari, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis diluar Panti, dimana capaiannya sebagai

berikut :

Tabel 3.11

Realisasi PPKS yang diberikan Pelayanan Kesajahteraan
Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Rehabilitasi Sosial			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Disabilitas	672	672	100
	Anak Terlantar	400	400	100
	Lanjut Usia Terlantar	300	300	100
	Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	204	204	100
	Jumlah	1.576	1.576	

Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025

Dari Tabel diatas, Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial pada Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 1.576 orang, dengan berbagai bantuan yang diberikan sesuai dengan subkegiatan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, Seperti : Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Alat Bantu, Layanan Rujukan, Layanan Reunifikasi , Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dan jenis bantuan lainnya.

2. Program Penanganan Bencana

a. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Sama seperti Program Rehabilitasi Sosial, Indikator Program ini merupakan Indikator pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan wajib yang di emban Dinas Sosial Kota Bekasi, dengan target 100%, dan untuk capaian tahun 2025 telah dicapai 100% atau 8.100 Korban Bencana, Baik

Bencana Alam dan Bencana Sosial

Tabel 3.12
Jumlah Korban Bencana Tahun 2025

No	Kejadian	Jumlah Korban		Ket
		Kepala Keluarga	Jiwa	
	Bencana Alam		7.655	Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Bencana non Alam	-	269	
	Bencana Sosial	-	176	
Jumlah			8.100	

Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025

Jenis Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi berupa, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial, Indikator ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan membuat kegiatan berbasis outcome dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran.
2. Melakukan Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;



3. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan Capaian Indikator;

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pada Program ini, dilaksanakan Kegiatan atau Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat miskin, sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi, Target 10.928 orang, dengan realisasi sebanyak 10.149 orang atau 93%, Program dan Kegiatan ini didukung anggaran sebesar **Rp. 3.248.486.800,-** (Tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), anggaran ini berasal dari APBD dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Realisasi sebesar **Rp. 2.727.545.020** (Dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh rupiah) atau **83,96 %**.

Kegiatan ini memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin di Kota Bekasi

Tabel 3.13

Realisasi PPKS yang menerima Bantuan Langsung Tunai

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Program Perlindungan dan JAminan Sosial			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
	APBD	2.588	2.032	79
	DBHCHT	8.340	8.117	97
	Jumlah	10.928	10.149	93

Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025

Berdasarkan analisa terhadap capaian Indikator Sasaran Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan capaian sebesar 132% atau sebanyak 19.825 PPKS yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial, adapunn rincian PPKS sebagai berikut :

Tabel 3.14

Jumlah Realisasi PPKS pada Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

NO	PPKS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	Disabilitas	672	672	100%	
2	Anak Terlantar	400	400	100%	
3	Lanjut Usia Terlantar	300	300	100%	
4	Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	204	204	100%	
5	Korban Bencana	8.100	8.100	100%	
6	Masyarakat Miskin (BLT)	10.928	10.149	93%	
	JUMLAH	20.604	19.825	96%	

Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025

**3.2.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberfungsian
Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

1. Persentase PSKS yang dibina

Pada sasaran ini, keberfungsian PSKS dimana PSKS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi, PSKS di Kota Bekasi diantaranya :

1. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Dalam Hal pencapaian indikator ***Persentase psks yang dibina***, di tahun 2025, Dinas Sosial bersinergi secara langsung dengan PSKS, dimana tugas Pokok dan fungsi PSKS adalah ***Melakukan Pendampingan Terhadap PPKS dalam mendapatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial.***

Dinas Sosial dalam mewujudkan Keberfungsian PSKS melakukan Pembinaan dan Pelatihan terhadap PSKS

dimana Keberfungsian PSKS dilihat dari Jumlah PPKS yang diberikan pendampingan dalam mendapatkan jenis-jenis pelayanan kesejahteraan sosial, Sasaran ini dinilai keberhasilannya dengan satu indikator, yaitu, **Persentase PSKS yang dibina**, dengan Target di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100% , Indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan.

a. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan realisasi Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase PSKS yang dibina

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase psks yang dibina	persen	100	100	100

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 100 Persen, realisasi mencapai 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 telah tercapai. dengan target di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100% dari Jumlah PSKS di Dinas Sosial, Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan. Capaian Kinerja pada Sasaran ini sebesar 100%, hal ini dikarenakan berfungsinya PSKS Dinas Sosial Kota Bekasi dengan jumlah 250 orang yang terdiri dari 12 orang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan 238 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Jumlah PSKS yang dibina x 100%

Jumlah PSKS di Kota Bekasi

250 x 100 %

250

= **100%**

Untuk melihat perbandingan capaian Persentase psks yang dibina Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun
2024 dengan 2025**

Tabel 3.16

Data Capaian persentase PSKS yang dibina Tahun 2024 dan 2025

No	IKK	Capaian 2024	Capaian 2025	Ket
1	Meningkatkan keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	Tetap

Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa secara kuantitas Persentase Capaian tetap pada tahun 2025

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase PSKS yang berfungsi di Dinas Sosial antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 Untuk Indikator Kinerja Sasaran
Persentase PSKS yang dibina

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2024	2025
1	Persentase PSKS yang dibina	Persen	100	100

Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025

c. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peran Serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Bekasi dalam memberikan bantuan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Warga Kota Bekasi Khususnya PPKS Kota Bekasi;
2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PSKS dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya.
3. Terjalannya Kerjasama dengan Panti atau Yayasan-yayasan di Kota Bekasi dalam penanganan PPKS;

4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Corporate Social Responsibility (CSR) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga.
 5. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Dinas Sosial dengan PSKS;
 6. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Tupoksi PSKS, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
- Pencapaian indikator Persentase PSKS yang dibina tahun 2025 ini didukung oleh indikator capaian Program, Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.18
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase psks yang dibina

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Prosentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berfungsi	Persen	100	100	100

Sumber : Notulen Evaluasi Internal TW IV tahun 2025

Dengan melihat indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase psks yang dibina di tahun 2025. Capaian indikator Persentase psks yang dibina di Dinas Sosial tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**d. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Target
RENSTRA**

Tabel 3.19

Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase psks yang dibina Target Akhir Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase psks yang dibina					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target	Persen	100	100	100	100	100	100
Realisasi	Persen	100	100				

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase psks yang dibina pada tahun 2024 sebesar 100% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2025 sebesar 100%, maka Dinas Sosial Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Sosial untuk meningkatkan capaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase psks yang dibina di Dinas Sosial Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

e. Program Pendukung

Tabel 3.20

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase psks yang dibina di Dinas Sosial Kota Bekasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KEUANGAN			
			RENCANA		REALISASI	
			Rp	(%)	Rp	(%)
1.06.01.01 - 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.341.258.639	3.341.258.639	100	2.427.542.487	72,65
1.06.01.01 - 02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.341.258.639	3.341.258.639	100	2.427.542.487	72,65
1.06.01.01 - 02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.160.895.223	1.160.895.223	100	1.086.086.129	93,56
1.06.01.01 - 02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	182.567.701	182.567.701	100	145.289.996	79,58
1.06.01.01 - 02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.997.795.715	1.997.795.715	100	1.196.166.362	59,87
JUMLAH		3.341.258.639	3.341.258.639	100	2.427.542.487	73

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase PSKS yang dibina, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **3.341.258.639,-** (Tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **2.427.542.487,-** (Dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase psks yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 73 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Capaian Kinerja sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

3.2.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar nasional

Dalam Hal Ini, Dinas Sosial mengacu Kepada Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar nasional

NO	INDIKATOR					
	DINAS SOSIAL KOTA BEKASI		TARGET	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT		TARGET 2025
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	12%	Meningkatnya Keberfungsian Sosial PPKS melalui pelayanan Panti	Indeks Rehabilitasi Sosial	15%
2	Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang dibina	100%	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Sosial	64,67%

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Dinas Sosial Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **31.132.479.236**, pada penetapan APBD Tahun 2024 yang dijabarkan dalam 6 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Pagu Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi
Per Program Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU	
		AWAL	PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 15.061.828.880	Rp 14.171.420.836
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 4.524.850.000	Rp 3.341.258.639
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 4.402.800.000	Rp 4.645.554.625
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp, 4.777.649.800	Rp 4.572.316.800
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 2.130.000.000	Rp 1.876.244.335
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 989.150.000	Rp 619.756.910
	JUMLAH	Rp. 31.886.278.680	Rp 29.226.552.145

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi simplebang tahun 2025.

Total anggaran Dinas Sosial berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi **Rp 29.226.552.145,-** dengan realisasi sebesar Rp. 25.081.142.712 (85,82%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23
Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Bekasi Setelah APBD-P Per Program Tahun 2025

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.171.420.836	Rp 12.762.370.465	90,06
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 3.341.258.639	Rp 2.427.542.487	72,65
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 4.645.554.625	Rp 4.005.923.311	86,23
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 4.572.316.800	Rp 3.717.696.432	81,31



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



5	Program Penanganan Bencana	Rp 1.876.244.335	Rp 1.578.973.331	84,16
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 619.756.910	Rp 588.636.686	94,98
	JUMLAH	Rp 29.226.552.145	Rp25.081.142.712	85,82

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui aplikasi Simplebang tahun 2025

Penyerapan anggaran sebesar 85,82% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

3.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian Kinerja, Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki Sumber Daya Manusia baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dan Para Pekerja Sosial Masyarakat, yang semuanya berkontribusi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Adapun rincian Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025 terdiri dari:

- a. ASN : 33 Orang
- b. Non ASN : 38 Orang
- c. TKSK : 12 Orang
- d. PSM : 238 Orang
- e. Peksos : 10 Orang
- f. TAGANA : 88 Personil.
407 Orang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



Dengan demikian pada Dinas Sosial Kota Bekasi terdapat 407 orang personil dimana didalamnya 7 orang merupakan pejabat struktural dan 64 orang merupakan pelaksana. Dari 67 orang pelaksana tersebut sebanyak 10 orang diangkat sebagai anggota Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Bekasi. Tim URC tersebut bertugas menangani langsung kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di lapangan, baik melalui laporan masyarakat, maupun instansi pemerintah lainnya. Disamping aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi juga terdapat 121 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 12 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mendampingi PMKS, baik lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar serta penanganan korban pasca terjadinya bencana alam dan bencana sosial, disamping itu terdapat 88 orang Taruna Siaga Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 400.9.10/Kep.160-Dinsos/I/2024 tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bekasi.

Untuk mengoptimalkan peran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial ke depan, Dinas Sosial Kota Bekasi telah mengajukan kebutuhan personil teknis bisang sosial sebagai berikut:

Tabel 3.24
Kebutuhan Personil

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1.	Analisis Bencana	D3/S-1 (Ekonomi)	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Perlindungan Korban Bencana Alam Menganalisis fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana; Menganalisis Personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penanganan bencana. Menganalisis pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB).
2.	Pengelola Perlindungan Sosia	SLTA/D-3/S-1 (Ekonomi)	<ol style="list-style-type: none"> Mengelola pelaksanaan dan pemberian bantuan sosial terhadap kinerja migran korban tindak kekerasan; Mengelola pelaksanaan perlindungan dan pemberian bantuan sosial korban bencana sosial dan PMKS; Mengelola pelaksanaan kegiatan perlindungan dan penyuluhan sosial lingkup kota; Mengelola Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Perlindungan Sosial.
3.	Pengelola Data Bantuan Sosial	SLTA/D-3/S-1 (Management)	<ol style="list-style-type: none"> Mengelola bahan dan menyusun anggaran; Mengelola pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam; Mengelola fasilitasi kebutuhan dasar (pangan); Mengelola personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA); Mengelola pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB).
4.	Analisis Rehabilitasi Sosial Untuk Penanganan PMKS	D3/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosial)	<ol style="list-style-type: none"> Menganalisa pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pekerja seks komersial; Menganalisis rehabilitasi sosial terhadap orang dengan HIV?AIDS; Menganalisa pelaksanaan pencegahan dan penjangangan terhadap PMKS;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025

			4. Menganalisa/memfasilitasi rehabilitasi sosial mantan korban Narkoba.
5.	Analisis Rehabilitasi Sosial Untuk Anak dan Lansia	D3/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosial)	1. Menganalisa bahan dan proses pengangkatan anak; 2. Menganalisa bimtek dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial; 3. Menganalisa pemberian bantuan sosial bagi Anak dan Lansia.
6.	Analisis Rehabilitasi Sosial Untuk Penyandang Disabilitas	D3/D4/S1 (Jurusan Ilmu—lmu Sosia dan Psikologi)	1. Menganalisa pelaksanaan/memfasilitasi Loka Bina Karya (LBK); 2. Menganalisa dan memfasilitasi pendampingan orang terlantar disabilitas; 3. Menganalisa dan menyiapkan bahan pemberian bantuan terhadap LKS Disabilitas.
7.	Penegelola Bimbingan Sosia	S-1/S-2 Jurusan Psikologi	1. Mengelola pelaksanaan rehabilitasi terhadap pekerja seks komersial; 2. Mengelola pelaksanaan pendampingan mental untuk PMKS; 3. Mengelola pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pekerja seks komersial; 4. Mengelola rehabilitasisosial terhadap orang dengan HIV/AIDS; 5. Mengelola pelaksanaan pencegahan dan penjarangan PMKS; 6. Mengelola/Memfasilitasi sosial mantan korban narkotika; 7. Mengelola bahan dan proses pengangkatan anak; 8. Mengelola bimtek dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial; 9. Mengelola pemberian bantuan sosial bagi anak dan lansia; 10. Mengelola pelaksanaan/memfasilitasi Loka Bina Karya (LBK); 11. Mengelola/memfasilitasi pendampingan orang terlantar disabilitas;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025**



			12. Mengelola dan menyiapkan bahan pemberia bantuan terhadap LKS disabilitas; 13. Mengelola pelaksanaan pendampingan mental untuk PMKS.
--	--	--	--



BAB IV

PENUTUP

LKIP Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan Dokumen yang menggambarkan Akuntabilitas Pencapaian Kinerja Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama Tahun 2025. Di dalamnya termuat kondisi yang telah dicapai, faktor-faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, serta efisiensi sumber daya anggaran yang dapat diperoleh, selain itu, memuat pula rencana upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja ditahun 2026.

Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi di tahun 2025 difokuskan dalam mendukung pencapaian ***Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*** sebagai tolak ukur keberhasilan Wali Kota dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi, tolak ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi dalam mendukung ketercapaian Meningkatkan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang terealisasi sebesar **15,82%** dari target **12 %** sehingga capaian kinerja sebesar **132%**.

Secara singkat dapat disampaikan bahwa nilai **15,82%** dengan pencapaian sebesar **132%**, bahwa di tahun 2025, terdapat kejadian bencana banjir yang luar biasa, dengan jumlah warga yang terdampak bencana cukup besar, dimana Korban Bencana Banjir merupakan Pemerlu Pelayanan Kesajahteraan Sosial (PPKS) yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dari Kota Bekasi, sehingga pada saat yang dibutuhkan, kebutuhan dasar seperti, Sandang, Pangan dan papan dapat terpenuhi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



Dalam mendukung pencapaian Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial tidak bisa hanya mengandalkan pegawai pada Dinas Sosial saja, peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sangat dibutuhkan dalam pencapaian itu, sehingga pencapaian kinerja Dinas Sosial yang kedua yaitu ***Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*** .

Pencapaian kinerja **Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial, tolak ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi dalam mendukung ketercapaian adalah **Persentase PSKS yang dibina**, yang terealisasi sebesar **100%** dari target **100 %** sehingga capaian kinerja sebesar **100%**.

Persentase PSKS yang dibina oleh Dinas Sosial seperti **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)** yang berjumlah **238 orang** dan **Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)** yang berjumlah **12 Orang**, sehingga yang menjadi tolak ukur PSKS yang dibina berjumlah **250 Orang**, berdasarkan laporan bulanan yang dibuat oleh masing-masing PSKS tersebut, Dinas Sosial melakukan Verifikasi, yang menyatakan keseluruhan PSKS berfungsi dengan baik.

Ketercapaian Kinerja diperoleh melalui pelaksanaan 6 Program, yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dari pelaksanaan program-program tersebut, Dinas Sosial memiliki efisiensi sebesar **15%** atau sebesar **Rp. 4.145.409.433,-** dari pagu



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2025



anggaran sebesar **Rp. 29.226.552.145,-** terealisasi sebesar **Rp. 25.081.142.712,-**.

Dengan Kinerja yang telah dicapai di tahun 2025, Dinas Sosial Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan baik kinerja maupun akuntabilitas kinerja, dengan demikian dapat mewujudkan tatakelola yang berkualitas untuk mendorong pembangunan Kota Bekasi yang lebih efektif dalam kesejahteraan sosial.